

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan warga binaan perspektif *Siyasah Tanfiziyyah* (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu belum memenuhi standar yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Pelayanan bersifat reaktif dan kuratif, dengan hanya satu perawat harian dan dokter yang hadir dua kali seminggu. Prosedur rujukan berbelit sehingga menimbulkan keterlambatan penanganan. Warga binaan hamil dan menyusui tidak mendapat fasilitas yang layak tidak ada ruang khusus, bidan tetap, layanan antenatal rutin, maupun ruang laktasi. Program kesehatan jiwa praktis tidak berjalan. Kondisi ini diperparah oleh enam kendala sistemik: kekurangan tenaga kesehatan, keterbatasan anggaran, minimnya sarana diagnostik, *overcrowding*, kurangnya sensitivitas gender, dan rendahnya kesadaran kesehatan warga binaan.
2. Dalam perspektif *Siyasah Tanfiziyyah*, kondisi tersebut mencerminkan belum terpenuhinya tiga kewajiban pokok pemerintah: perencanaan (*al-takhthith*), pelaksanaan (*al-tanfiz*), dan pengawasan (*al-muraqabah*). Negara sebagai pemegang amanah wajib menjaga jiwa warga binaan berdasarkan prinsip *hifz al-nafs* dan menghilangkan segala bahaya

berdasarkan kaidah *‘il-dlararu yuzal’* Prinsip *mashlahah dlaruriyyah* menempatkan layanan kesehatan dasar sebagai kewajiban yang tidak dapat ditunda. Praktik pemborgolan saat persalinan yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan pelanggaran nyata terhadap *karamah insaniyyah* (kemuliaan manusia) yang dijamin dalam QS. Al-Isra: 70. Kesenjangan antara regulasi yang sudah lengkap dengan implementasi yang lemah adalah bukti bahwa *tanfiz* belum dijalankan dengan penuh amanah dan tanggung jawab.

B. Saran

1. Kepada Direktorat Jenderal Pemasarakatan perlu melakukan penambahan serta pemerataan sumber daya manusia di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu, khususnya tenaga kesehatan dan petugas pemasarakatan. Keterbatasan jumlah pegawai berpengaruh terhadap optimalisasi pelayanan kesehatan dan pembinaan warga binaan.
2. Perlu mengusulkan penerimaan pegawai baru, terutama tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan reproduksi perempuan. Penambahan pegawai tersebut diperlukan untuk menjamin terpenuhinya hak kesehatan warga binaan perempuan secara optimal.
3. Hendaknya pengangkatan dan promosi pegawai dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi, profesionalitas, dan kinerja. Sistem promosi yang transparan akan meningkatkan motivasi kerja pegawai serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada warga binaan. Selain itu, penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya akan mendukung

efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, khususnya dalam pelayanan kesehatan warga binaan perempuan.

4. Hendaknya Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu perlu memperkuat kerja sama dengan dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dan organisasi profesi kesehatan guna memastikan akses pelayanan kesehatan yang berkelanjutan bagi warga binaan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Aprita, Serlika, dan Yonani Hasyim. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Atmasasmita, Romli. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail al-. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Dahwal, Sirman. *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Darmawan, Edi. *Teori dan Kajian Ruang Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Elgra, N. E., dkk. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta, 1993.
- Edwards III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.

Hafidhuddin, Didin, dan Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Harsono C.I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*. Diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Jailani, Imam Amrusi, dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.

Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam*. Diterjemahkan oleh Masrolin. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama, 1994.

Kurnia, Titon Slamet. *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2007.

Lopa, Baharuddin. *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Mahfud MD, Moh. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Marlina. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2008.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017.
- Panjaitan, Petrus Irwan, dan Chairijah Putri A. Simorangkir. *LAPAS sebagai School of Crime*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Fiqh Maqashid Syariah*. Diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
-*Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*. Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Samosir, C. Djisman. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1992.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

- Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Sutarto. *Ensiklopedi Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung, 2007.
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung–Puslit KP2W Lemlit Unpad, 2006.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, 2014.

Artikel Ilmiah & Jurnal Akademik

- Adelina, Ria. “Pelayanan Publik dalam Perspektif Fiqh Siyasah.” Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2024.
- Ardinata, Mikho. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM* Vol. 11 No. 2 (2020).
- Aswanto. *Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum terhadap Penegakan HAM di Indonesia*. Disertasi. Makassar, 1999.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM RI. *Evaluasi Pemenuhan Hak untuk Mengembangkan Diri bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta, 2006.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. *Pelaksanaan Standard Minimum Rules (SMR) di Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta, 2003.
- Banapon, Kamil, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 5 (2021).
- Christy Edotry Torry Karwur, dkk. “Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau dari Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Lex Privatum* Vol. 13 No. 2 (2024).
- Citrawan, Harison. “Melampaui Pemasyarakatan: Analisis Wacana Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Koreksional Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* (2017).

- Daniali, Sar. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Asas Keterbukaan dalam Pelayanan Publik." Skripsi, UIN Datokarama Palu, 2022.
- Departemen Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta, 2008.
- Departemen Kehakiman dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Sejarah Pemasyarakatan: Dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan*. Jakarta, 2004.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI. *40 Tahun Pemasyarakatan Mengukir Citra Profesionalisme*. Jakarta, 2004.
- Fadli Andi Natsif. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Al-Risalah* Vol. 19 No. 1 (2019).
- Haedar, Akib dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya." *Jurnal Baca 1* (2008).
- Handayani, Yeni. *Pemenuhan Hak Kesehatan atas Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Tangerang Periode Tahun 2011*. Tesis, Universitas Indonesia, 2012.
- Hidayat, Rif'atul. "Hak atas Derajat Pelayanan Kesehatan yang Optimal." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* Vol. 16 No. 2 (2017).
- Hunt, Paul. "The UN Special Rapporteur on the Right to Health: Key Objectives, Themes, and Intervention." *Health and Human Rights* Vol. 7
- Kresnadari, Anggreini. "Urgensi Pemenuhan Hak Terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan." Tesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Laksasmita, Claudia, dan Budi Priyatmono. "Implementasi Pelayanan Kesehatan pada Narapidana Perempuan di Lapas Bengkulu." *Jurnal Ilmu Pemasyarakatan* 8, no. 2 (2021).
- Marselina C.L. Lbn Tobing, dkk. "Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita di Lapas Kelas IIA Tanjung Gusta Medan." *Jurnal Hukum To-Ra* 8, no. 2 (2022).
- Muh. Jufri Ahmad. "Analisis Perlindungan Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan dari Perspektif HAM." *Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 06 (2025).

Naning Ramdlon. *Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Makalah. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1983.

Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty. *Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo mengenai Pemasyarakatan Narapidana*. Jakarta, 2008.

Sulhin, Iqrak. "Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan." *Jurnal Kriminologi Indonesia* (2010).

Syahrudin. *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Isteri*. Disertasi. Makassar, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Laporan & Dokumen Resmi Pemerintah

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Data Sistem Database Pemasyarakatan*. Jakarta: Kemenkumham RI, 2023.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Evaluasi Kondisi Sanitasi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*. Jakarta: Kemenkumham RI, 2022.

Kementerian Hukum dan HAM RI. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022*. Jakarta: Ditjen PAS, 2023.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Kemenkes RI, 2023.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lapas dan Rutan*. Jakarta: Kemenkes RI, 2021.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Nelson Mandela Rules)*. New York: United Nations, 2015.